

Implementasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Administrasi Badan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB

Nurul Nafisah¹, Sheila Ramadhani², Sulhan Hadi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Nurul Nafisah

E-mail: nafisamujaki@gmail.com

Abstrak

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan salah satu bentuk layanan publik yang berbasis digital dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pengelolaan badan hukum. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat pada sektor Administrasi Hukum Umum (AHU). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan aplikatif dan partisipatif melalui dokumentasi, observasi, serta keterlibatan langsung mahasiswa dalam proses administrasi pelayanan badan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi sistem AHU Online berhasil meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Mahasiswa berkontribusi dalam pelayanan meja AHU, pengecekan dokumen awal, penyampaian informasi layanan, serta aktivitas koordinasi dan sosialisasi hukum. Walaupun masih ada tantangan seperti masalah sistem dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, pelayanan AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB secara keseluruhan telah mencerminkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci – pelayanan publik, AHU Online administrasi hukum umum, digitalisasi pelayanan

Abstract

General Legal Administration Services (AHU) is a form of digital-based public service aimed at providing legal certainty to the public in managing legal entities. This community service activity was carried out through an internship program at the Regional Office of the Ministry of Law of West Nusa Tenggara in the General Legal Administration (AHU) sector. The implementation method used an applied and participatory approach through documentation, observation, and direct student involvement in the legal entity service administration process. The results of the activity showed that the implementation of the AHU Online system successfully increased the effectiveness, efficiency, and transparency in services to the public. Students contributed to AHU desk services, initial document checking, communicating service information, as well as legal coordination and outreach activities. Although there are still challenges such as system problems and low levels of digital literacy in the community, AHU services at the Regional Office of the Ministry of Law of West Nusa Tenggara have overall reflected quality, responsive public services, and focused on community needs.

Keywords - public services, AHU Online general legal administration, digitalization of services

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui penyediaan barang, jasa, maupun administrasi. Kualitas layanan publik merupakan indikator krusial dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan karena berhubungan langsung dengan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan untuk masyarakat. Dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah terus mengubah layanan publik menjadi berbasis digital untuk menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Transformasi digital ini merupakan elemen dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance dengan pelayanan publik yang profesional dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat (Muharman & Frinaldi, 2023).

Salah satu wujud layanan publik berbasis digital yang dibangun pemerintah adalah layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelayanan AHU meliputi pengelolaan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, perkumpulan, fidusia, serta layanan kenotariatan yang memiliki peranan krusial dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi badan hukum, pemerintah meluncurkan sistem AHU Online atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang memungkinkan proses pelayanan secara elektronik, meliputi pengajuan dokumen, verifikasi data, sampai penerbitan dokumen badan hukum. Penggunaan sistem digital tersebut dianggap dapat memperbaiki kualitas layanan administrasi hukum agar lebih efektif, efisien, dan transparan (Lumbantobing & Wijaya, 2025).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berperan vital dalam pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum di tingkat lokal. Pelayanan administrasi badan hukum di Kanwil Kementerian Hukum NTB tidak hanya terfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga mencakup pembinaan serta pengawasan layanan hukum untuk masyarakat dan notaris di daerah Nusa Tenggara Barat. Melalui program magang, mahasiswa berkontribusi secara langsung dalam mendukung layanan di bidang Administrasi Hukum Umum dengan membantu tugas di meja AHU, memverifikasi dokumen awal, memberikan informasi kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan seperti rapat koordinasi, zoom meeting nasional, sosialisasi layanan hukum, dan pelantikan notaris. Partisipasi mahasiswa dalam pelayanan publik merupakan bentuk penerapan pembelajaran praktik administrasi publik secara langsung serta mendukung perbaikan mutu layanan administrasi hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor Administrasi Hukum Umum (AHU). Kegiatan dilaksanakan dengan metode partisipatif dan aplikatif, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam proses pelayanan administrasi badan hukum kepada masyarakat lewat sistem AHU Online. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa membantu pelayanan di meja AHU, melakukan verifikasi dokumen awal, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan administrasi badan hukum, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelembagaan seperti rapat koordinasi, zoom meeting nasional, sosialisasi layanan hukum, dan pelantikan notaris. Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi langsung, dokumentasi kegiatan, serta partisipasi aktif mahasiswa selama penyelenggaraan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat adalah salah satu jenis layanan publik yang bertujuan memberikan kepastian

hukum bagi masyarakat, terutama dalam administrasi badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, perkumpulan, fidusia, dan layanan notaris. Adanya pelayanan administrasi badan hukum merupakan elemen penting dalam mendukung perlindungan hukum serta mewujudkan ketertiban administrasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Salman Alfarizi Muhtar et al., 2025)


Pelaksanaan pelayanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB telah memanfaatkan sistem digital melalui AHU Online atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem tersebut digunakan untuk mempermudah masyarakat maupun notaris dalam melakukan pengajuan administrasi badan hukum secara elektronik tanpa melalui prosedur manual yang memerlukan waktu lebih lama. Digitalisasi pelayanan publik melalui AHU Online menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi hukum agar lebih cepat, efektif, dan transparan (Lumbantobing & Wijaya, 2025). Selain itu, penggunaan sistem digital juga membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program magang, mahasiswa berpartisipasi langsung dalam mendukung layanan administrasi badan hukum di bidang Administrasi Hukum Umum. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelayanan di meja AHU, membantu memverifikasi dokumen awal, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan badan hukum, serta membantu administrasi pelayanan. Partisipasi mahasiswa itu merupakan wujud kontribusi konkret dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB. Kehadiran mahasiswa magang turut mempermudah proses pelayanan, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan lebih optimal dan responsif.

Selain berpartisipasi dalam tugas administratif, mahasiswa juga terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi yang berhubungan dengan pelayanan Administrasi Hukum Umum. Kegiatan ini mencakup zoom meeting nasional, rapat koordinasi internal, sosialisasi layanan hukum, pelantikan notaris se-NTB, dan kegiatan penarikan magang. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini menunjukkan bahwa pelayanan AHU tidak hanya terpusat pada penyelesaian administrasi badan hukum, tetapi juga meliputi bimbingan, pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Ini sejalan dengan konsep pelayanan publik kontemporer yang menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan responsif (Muharman & Frinaldi, 2023).

Tabel 1.

Dokumentasi aktivitas mahasiswa selama pelaksanaan program magang di bidang Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1.	Pelayanan pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU)	

2. Kegiatan zoom meeting tingkat nasional (se-Indonesia)



3. Sosialisasi prinsip mengenali penggunaan jasa PMPJ



4. Kegiatan zoom internal/koordinasi



5. Pelantikan notaris se-NTB



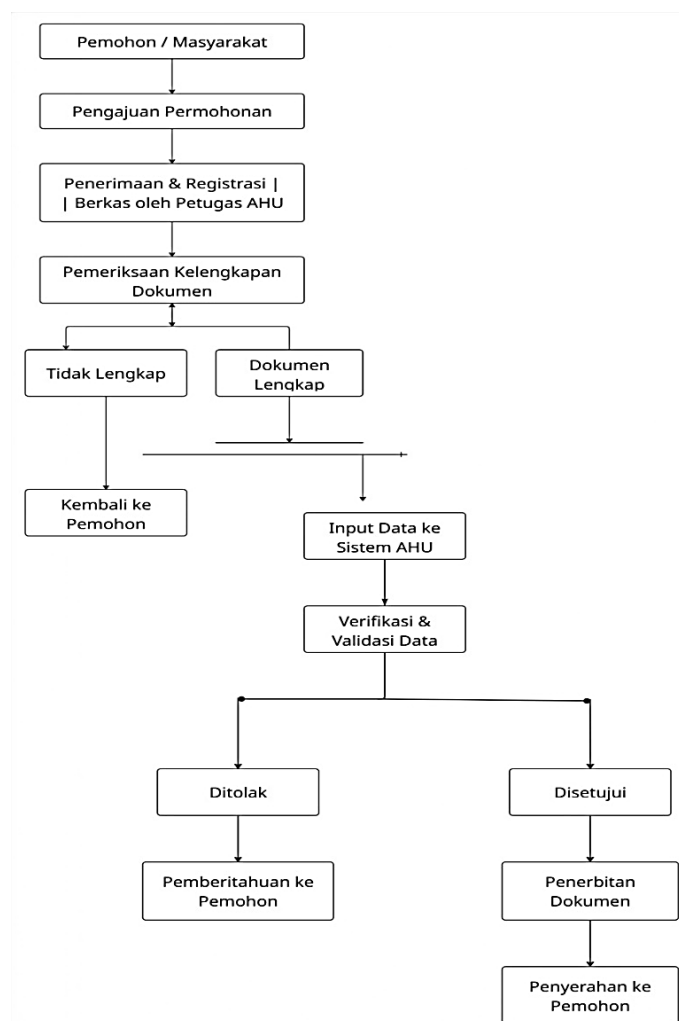
6. Kegiatan penarikan peserta magang



Proses pelayanan administrasi badan hukum melalui AHU Online dilakukan melalui beberapa langkah, yang dimulai dengan pengajuan berkas oleh pemohon atau notaris, pemeriksaan dan verifikasi dokumen, proses validasi data, hingga penerbitan dokumen badan hukum secara elektronik. Mekanisme layanan digital ini berdampak positif bagi efektivitas pelayanan publik karena proses administrasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi layanan publik yang berbasis digital merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi hukum di Indonesia (Al., 2021). Pelayanan administrasi yang menggunakan teknologi elektronik dianggap dapat mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan transparansi dalam administrasi pemerintahan (Khuzaemah, 2024).

Berikut adalah diagram tentang cara pelayanan administrasi badan hukum melalui AHU Online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB :

Diagram Alur Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Ahu)



Gambar 1.

Diagram Alur Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Ahu)

Walaupun pelayanan Administrasi Hukum Umum telah menggunakan sistem digital, beberapa masalah masih muncul dalam pelaksanaannya seperti gangguan sistem, keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital warga, serta tingginya ketergantungan masyarakat pada notaris dalam pemakaian sistem AHU Online. Kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas

pelayanan administrasi badan hukum jika tidak didukung oleh infrastruktur teknologi serta sumber daya manusia yang cukup. Dengan demikian, peningkatan mutu sumber daya manusia dan penguatan sistem layanan digital menjadi elemen krusial dalam mendukung keberhasilan layanan publik berbasis elektronik (Siagian, 2024). Pelaksanaan layanan berbasis digital membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi dan SDM agar pelayanan dapat berjalan dengan baik (Waji, 2022).

Implementasi layanan Administrasi Hukum Umum berbasis digital melalui AHU Online menunjukkan pergeseran dari sistem manual ke sistem elektronik yang lebih canggih dan terintegrasi. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi badan hukum dengan lebih cepat dan efisien. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, pemanfaatan sistem digital juga berkontribusi pada terciptanya transparansi dalam administrasi karena proses pelayanan dapat diawasi secara daring. Inovasi pelayanan publik yang mengandalkan teknologi merupakan langkah krusial untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Keberhasilan layanan digital dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi layanan publik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan cerdas melalui layanan yang modern dan didukung teknologi informasi (Kurniawan, 2022).

Pelaksanaan program magang di bidang Administrasi Hukum Umum memberikan keuntungan bagi mahasiswa untuk memahami praktik administrasi publik secara langsung dalam lingkungan pemerintahan. Dengan berpartisipasi dalam layanan administrasi lembaga hukum, mahasiswa mendapatkan pengalaman tentang mekanisme pelayanan publik, koordinasi antar lembaga, dan prinsip etika dalam melayani masyarakat. Pengalaman itu menjadi sarana belajar langsung yang mendukung peningkatan kemampuan komunikasi, tanggung jawab, dan profesionalisme mahasiswa. Kegiatan magang tersebut tidak hanya membantu layanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, namun juga berfungsi sebagai wadah pengembangan kemampuan mahasiswa di bidang administrasi publik dan pelayanan hukum.

Pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB juga mencerminkan penerapan prinsip tata kelola yang baik melalui pelayanan yang terbuka, profesional, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi digital, transparansi informasi layanan, serta peningkatan efisiensi administrasi merupakan indikator krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kehadiran mahasiswa magang dalam mendukung layanan administrasi badan hukum juga membawa dampak positif bagi instansi serta berfungsi sebagai wahana pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk memahami penerapan administrasi publik secara langsung di lapangan.

KESIMPULAN

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam administrasi badan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dengan menggunakan sistem digital melalui AHU Online yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi layanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan magang, mahasiswa berpartisipasi dalam mendukung layanan administrasi badan hukum serta mendapatkan pengalaman praktis tentang pelaksanaan layanan publik dan administrasi hukum secara langsung di lingkungan pemerintah. Walaupun masih ada beberapa tantangan seperti masalah sistem dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, secara keseluruhan pelayanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB telah mencerminkan penerapan prinsip good governance melalui pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, terutama pada sektor Administrasi Hukum Umum (AHU), yang telah memberikan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

peluang dan arahan selama pelaksanaan program magang. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pegawai dan pihak yang terlibat yang telah memberikan bantuan serta bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga magang dan penyusunan jurnal ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah mendukung selama proses penyusunan laporan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). Analisis Penerapan Sistem Ahu Online Pada Ditjen Ahu, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).
- Kurniawan, T. (2022). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 264-281.
- Lumbantobing, F. V. B., & Wijaya, K. A. S. (2025). Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia melalui Website AHU Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(3), 1–10. <https://doi.org/10.61292/eljbn.275>
- Muharman, A., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan pelayanan publik yang berinovasi dalam mewujudkan good governance pada sektor publik. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 90-98. [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12670](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12670)
- Sabighoh, U. N. (2024). *Kewajiban atas kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian perspektif masalah (Studi kasus pada Pengadilan Agama Tenggarong)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Salman Alfarizi Muhtar, Hayat, & Septina Dwi Rahmawati. (2025). Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, 6(1), 99–111. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i1.135>
- Siagian, T. M. N. (2024). Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat. *Tadbir Muwahhid*, 8(2), 269–283. <https://doi.org/10.30997/jtm.v8i2.15903>
- Waji, N. R. (2022). SIPKUMHAM and the Rise of Digitalization in the Ministry of Law and Human Rights. *Jurnal Ham*, 13, 479.